

PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT 2017

<https://sumbar.bps.go.id>



PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT 2017

ISBN : 978-602-6544-39-1
Nomor Publikasi : 13520.1807
Katalog : 4101032.13
Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 44 halaman

Naskah : Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Penyunting : Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Ilustrasi Kulit dan Gambar/Pembatas : <http://pikbest.com>

Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dicetak Oleh : CV. Graphic Dwipa (cetakan I)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)

PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT 2017

Pengarah : Dr. Ir. Sukardi, M.Si

Penanggung Jawab : Krido Saptono, S.Si, M.Si

Editor : Krido Saptono, S.Si, M.Si
Ichsan, SST
Ir. Yunimarlita
Deswaty, SST

Penulis : Dr. Rita Diana, S.Si, M.Si

Pengolah Data : Dr. Rita Diana, S.Si, M.Si

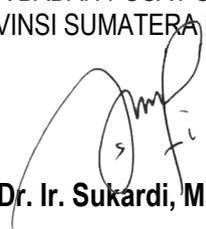
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dilimpahkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan izin-Nya, penyusunan buku ini dapat diselesaikan pada waktunya. **"Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat 2017 "** merupakan salah satu publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat yang menyajikan informasi mengenai pembangunan manusia dilihat dari kualitas penduduk dalam hal penggunaan dan pelayanan alat kontrasepsi. Selain itu publikasi ini juga dapat digunakan sebagai alat monitoring untuk melihat tercukupinya kebutuhan keluarga berencana. Gambaran kondisi kependudukan di Sumatera Barat dilihat untuk kondisi tahun 2017. Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2017.

Publikasi ini merupakan publikasi kedua dan khusus mengenai kependudukan dan keluarga berencana yang disusun oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Padang, Desember 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT,



Dr. Ir. Sukardi, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Sistematika Penulisan	5
BAB II METODOLOGI	7
2.1. Sumber Data	9
2.2. Konsep dan Definisi	9
BAB III PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	13
3.1. Profil Kependudukan Provinsi Sumatera Barat	15
3.2. Keluarga Berencana	18
BAB IV PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	31
4.1. Pembangunan Kependudukan.....	33
4.2. Umur Perkawinan/Hamil Pertama.....	34
4.3. Rata-Rata Jumlah Anak Lahir Hidup	37
BAB V PENUTUP	41
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1.1 : Beberapa Indikator Demografi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	16
Tabel 3.2.1 : Persentase Perempuan Berstatus Kawin Usia 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, Wilayah Tempat Tinggal dan Golongan Pengeluaran di Sumatera Barat Tahun 2017	25
Tabel 3.2.2 : Angka <i>Unmet Need</i> di Sumatera Barat Tahun 2017	26
Tabel 3.2.3 : Persentase Perempuan Pernah Kawin Menurut Alasan Utama Tidak Ber-KB dan Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2017	28
Tabel 3.2.4 : Persentase Perempuan Pernah Kawin Menurut Tempat Memperoleh KB Terakhir dan Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2017	29
Tabel 4.2.1 : Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2017	34
Tabel 4.2.2 : Rata-Rata Umur Hamil Pertama Perempuan Pernah Kawin Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2017	35
Tabel 4.2.3 : Persentase Perempuan Pernah Kawin Yang Usia Perkawinan Pertama dan Hamil pertama di Bawah 16 tahun di Sumatera Barat Tahun 2017	36
Tabel 4.3.1 : Rata-Rata Jumlah Anak Yang Dilahirkan Hidup Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2017	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1.1 : Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	17
Gambar 3.2.1 : Persentase Perempuan Kawin Yang Pernah Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal Dan Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2017	20
Gambar 3.2.2 : Persentase Perempuan Kawin Yang Pernah/Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2017	21
Gambar 3.2.3 : Persentase Perempuan Kawin Yang Pernah/Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Pendidikan Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2017	22
Gambar 3.2.4 : Persentase Perempuan Kawin Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Kelompok Anak Lahir Hidup di Sumatera Barat Tahun 2017	24



PENDAHULUAN

<https://sahar.bps.go.id>



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memproyeksikan penduduk Indonesia pada 2020 akan menduduki peringkat kelima terbanyak dunia. Sebanyak 70 persennya adalah penduduk usia produktif. Besarnya struktur penduduk muda membuat kita berpeluang menikmati bonus demografi yang diperkirakan berlangsung selama 17 tahun (2018-2035). Untuk memanfaatkan bonus demografi, diperlukan investasi dalam perbaikan derajat kesehatan masyarakat; peningkatan peluang, akses dan kualitas pendidikan; peningkatan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja; pengendalian laju pertumbuhan penduduk; dan dukungan kebijakan ekonomi.

Tujuan pembangunan nasional sudah mengamanatkan agar kebijaksanaan kependudukan diarahkan pada pengembangan kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia yang dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan dan sasaran SDGs tidak akan tercapai, apabila masalah kependudukan, termasuk akses universal pelayanan kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana, serta perlindungan bagi hak-hak reproduksi, tidak ditangani dengan baik. Pada tahap implementasi, pemerintah daerah harus memiliki pemahaman dan tujuan yang sama sehingga permasalahan kependudukan juga menjadi tujuan

pembangunan daerah. Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat “Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana” menempati urutan ke-16 dari Permasalahan Pembangunan Daerah (Bappeda Sumbar, 2016).

Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi perkembangan kependudukan dapat dilihat dengan pendekatan indikator kependudukan dan keluarga berencana. Keluarga berencana diyakini telah merubah struktur kependudukan tidak hanya dalam artian mengendalikan laju pertumbuhan penduduk namun juga pengembangan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil berkualitas (BKKBN Riau, 2016).

Indikator kependudukan dan keluarga berencana yang akan dibahas adalah indikator demografi yang mencakup usia perkawinan pertama, Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (*Contraception Prevalency Rate*), *Unmet Need* KB (pembatasan dan penjarangan), Penolong Kelahiran Ibu, Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh perempuan, *Depedency Ratio*, Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama, Persentase penduduk usia 10-17 tahun yang pernah menikah.

1.2. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan pokok penulisan Publikasi “Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat 2017 Hasil Susenas Maret 2017”, yaitu:

1. Untuk mengetahui pembangunan kependudukan dilihat dari aspek kesehatan penduduk terutama dalam hal penggunaan alat KB dan pelayanan KB yang telah dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017.
2. Untuk memonitoring pelayanan KB yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dengan melihat tercukupinya kebutuhan keluarga berencana (*unmet need* pelayanan KB).

1.3. Sistematika Penulisan

Pembahasan utama dirinci ke dalam lima bab sesuai tema besar profil statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II metodologi, berisi tentang ruang lingkup dan konsep/definisi yang digunakan penulisan publikasi.

Bab III menjelaskan tentang informasi umum tentang profil demografi/kependudukan serta partisipasi KB.

Bab IV menyajikan pembahasan mengenai hasil pembangunan kependudukan yang tercermin dari indikator umur perkawinan pertama dan rata-rata anak lahir hidup.

Bab V penutup, berisi ringkasan tentang kondisi kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi Sumatera Barat secara umum.



PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

<https://suharjops.go.id>

BAB 2 METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan penyusunan indikator kependudukan dan KB dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS pada bulan Maret tahun 2017.

2.2. Konsep dan Definisi

Pembahasan yang disajikan dalam indikator kependudukan dan keluarga berencana ini menggunakan metode analisis deskriptif baik menyangkut Provinsi Sumatera Barat maupun perbandingan antara daerah perdesaan dan perkotaan serta perbandingan antar jenis kelamin. Konsep serta definisi dari indikator-indikator yang digunakan disajikan di bawah ini.

Penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan

sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) adalah Angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Beban Tanggungan Anak-anak (*Child Dependency Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara

penduduk usia di bawah 15 tahun dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan 100.

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah jumlah penduduk yang diwakili oleh penduduk perempuan berumur 15-49 yang berstatus kawin.

Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate) adalah proporsi penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB atau pasangannya yang sedang menggunakan alat/cara KB terhadap jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun. Alat/cara KB yang dimaksud adalah baik alat/cara KB modern maupun yang tradisional.

Persentase Pernah Menggunakan Alat/Cara KB adalah proporsi penduduk perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah menggunakan alat/cara KB terhadap jumlah penduduk perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun.

Rata-Rata Anak Lahir Hidup yang Dilahirkan Perempuan Pernah Kawin (PPK) Berumur 15-49 Tahun adalah Jumlah anak lahir hidup yang dilahirkan penduduk perempuan pernah kawin (PPK) berumur 15-49 tahun terhadap jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun.

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Berumur 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat/Cara KB adalah pasangan usia subur (PUS) berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat/cara

KB terhadap jumlah pasangan usia subur berumur 15-49 tahun.

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) berumur 15-49 Tahun Menggunakan Alat/cara KB dan Pernah Berhenti

adalah pasangan usia subur (PUS) berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat/cara KB dan pernah berhenti terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS) berumur 15-49 tahun.

Usia Perkawinan Pertama adalah usia pertama kali laki-laki atau perempuan melakukan hubungan seksual pertama kali.

Usia Hamil Pertama adalah usia pertama kali perempuan pernah kawin yang berusia 15-49 tahun hamil.

Unmet Need KB Pasangan Usia Subur (15-49 Tahun)

berstatus kawin adalah proporsi pasangan usia subur (PUS) berumur 15-49 tahun yang tidak menggunakan alat/cara KB tetapi tidak ingin hamil dengan alasan selain fertilitas terhadap jumlah pasangan usia subur berumur 15-49 tahun.

<https://sumbarbps.go.id>



PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA



BAB 3

PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

3.1. Profil Kependudukan Provinsi Sumatera Barat

Profil kependudukan atau gambaran demografi suatu daerah sangat berguna bagi perencanaan pembangunan. Dari hasil gambaran demografi dapat diketahui komposisi maupun struktur dari penduduk setempat. Apabila daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah dengan penduduk usia muda, berarti perencanaan pembangunan dapat diprioritaskan kepada penyerapan tenaga kerja atau perluasan pendidikan. Dari gambaran struktur penduduk juga dapat membantu perencanaan kesehatan misalkan apabila dikategorikan sebagai wilayah dengan struktur usia muda berarti tingkat kelahiran dan kematian relatif tinggi.

Untuk itu pemerintah harus memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dasar agar dapat menekan angka kematian dan menolong persalinan dengan aman. Gambaran demografi ini juga dapat memberikan manfaat. Dengan melihat angka beban ketergantungan dapat dirancang apakah daerah tersebut membutuhkan sekolah (apabila angka ketergantungan banyak di usia muda yaitu antara 0-14 tahun) atau malah membutuhkan jaminan sosial karena angka ketergantungan banyak di usia tua yaitu 65 tahun ke atas.

Beberapa rujukan yang dapat digunakan untuk menggolongkan

struktur penduduk suatu wilayah adalah:

- a. Kategori penduduk muda apabila umur median (*Median Age*) kurang dari 20 tahun.
- b. Kategori penduduk menengah (*intermediate*) apabila umur median berkisar 20-29 tahun.
- c. Kategori penduduk tua apabila umur median di atas 30 tahun.

Selain kategori di atas, kondisi wilayah juga dapat dilihat dari rasio penduduk tua muda. Apabila Rasio tua muda di bawah 15 maka dapat dikategorikan sebagai penduduk kelompok muda, sedangkan di atas 30 termasuk kategori kelompok tua, (BPS, 2010).

Tabel 3.1.1 Beberapa Indikator Demografi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

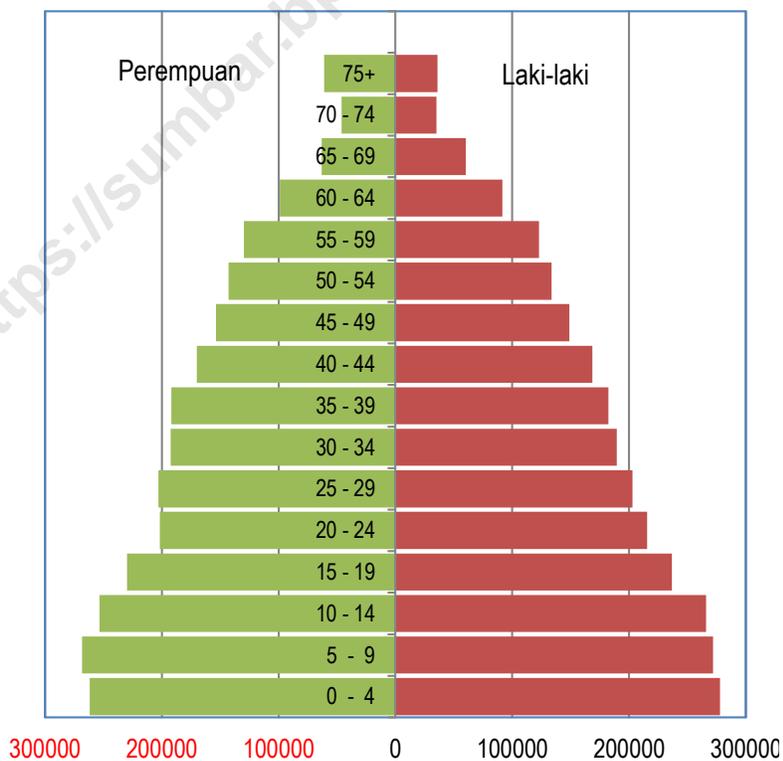
Indikator Demografi	Uraian
(1)	(2)
<i>Median Age</i>	27,00 tahun
Rasio Tua Muda	18,85 persen
<i>Sex Ratio</i>	98,95 persen
<i>Sex ratio</i> Usia 15-49 tahun	102,52 persen
<i>Child Dependency ratio</i>	46,96 persen

Sumber: Susenas Maret 2017

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2017 jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, atau dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 98,95. Dengan

kata lain setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Besaran *sex ratio* ini juga menunjukkan bahwa komposisi penduduk di Sumatera Barat serupa dengan komposisi penduduk yang ditemui di daerah negara berkembang. Lebih lanjut rasio jenis kelamin pada usia 15-49 tahun di Sumatera Barat sebesar 102,52. Ini menunjukkan pada usia muda dan produktif tidak banyak penduduk laki-laki yang bermigrasi ke luar. Apabila dijumpai rasio jenis kelamin pada usia 15-49 tahun yang nilainya di bawah 100, berarti ini mengindikasikan adanya migrasi keluar bagi penduduk laki-laki (Columbia University, 2016).

Dari hasil Susenas Maret 2017 juga diperoleh Median umur



Sumber: Susenas Maret 2017

Gambar 3.1.1 Piramida penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

penduduk Sumatera Barat yaitu 27,00 tahun dan rasio tua muda adalah 18,85 persen. Selain itu juga diperoleh Angka Beban Tanggungan untuk anak-anak mencapai 46,96 persen.

Indikator demografi di atas menunjukkan bahwa struktur penduduk di Sumatera Barat cenderung sudah meninggalkan struktur penduduk muda. Ini ditunjukkan oleh Rasio Tua Muda penduduk Sumatera Barat tahun 2017 mencapai 18,85 persen sementara yang dikategorikan sebagai struktur penduduk muda apabila Rasio Tua Muda berkisar di bawah 15 persen. Dapat dilihat dari gambar piramida penduduk (Gambar 3.1.1) yang punya kecenderungan melebar di kelompok usia muda.

3.2. Keluarga Berencana

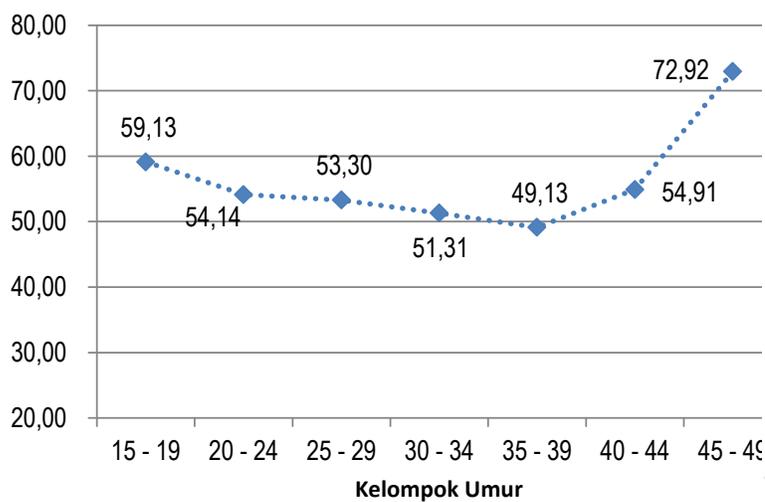
Paradigma pembangunan sekarang ini dilakukan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil berkualitas. Inti dari keluarga kecil berkualitas dipahami sebagai pembatasan jumlah anggota keluarga sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga tersebut. Pembatasan atau pengendalian jumlah anggota keluarga diprogramkan melalui pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) yang telah banyak mengubah struktur kependudukan Indonesia, tidak hanya dalam arti menurunkan tingkat kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, juga mengubah pandangan hidup penduduk terhadap nilai anak serta kesejahteraan dan ketahanan keluarga (Bappenas, 2016).

Pembangunan kependudukan sudah menjadi prioritas

pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, yaitu terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera. Salah satu misi yang dicanangkan di dalam mewujudkan visi pembangunan Sumatera Barat adalah "Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi". Untuk mencapai misi tersebut, diuraikan dalam bentuk tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan misi tersebut ada 5 tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan dicanangkan di tujuan 5, yaitu: "Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak".

Untuk mengetahui kebijakan dan program yang tepat untuk pelaksanaan KB, perlu diketahui perilaku (*behavior*) dari target populasi. Di sini yang menjadi target populasi adalah pasangan usia subur. Pasangan usia subur didekati dengan penduduk perempuan yang berstatus kawin dan berusia antara 15 hingga 49 tahun. Perilaku berbeda dapat dilihat dari tempat tinggal, jumlah anak yang dilahirkan hidup, pendidikan yang ditamatkan dan kelompok pengeluaran.

Informasi mengenai pasangan usia subur yang sudah tidak menggunakan alat/cara KB sangat bermanfaat bagi pembuat keputusan. Informasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi kenapa pasangan usia subur ini memutuskan untuk tidak ber-KB lagi sehingga pembuat program dapat merancang program lainnya yang sekiranya lebih sesuai dan tepat sasaran.

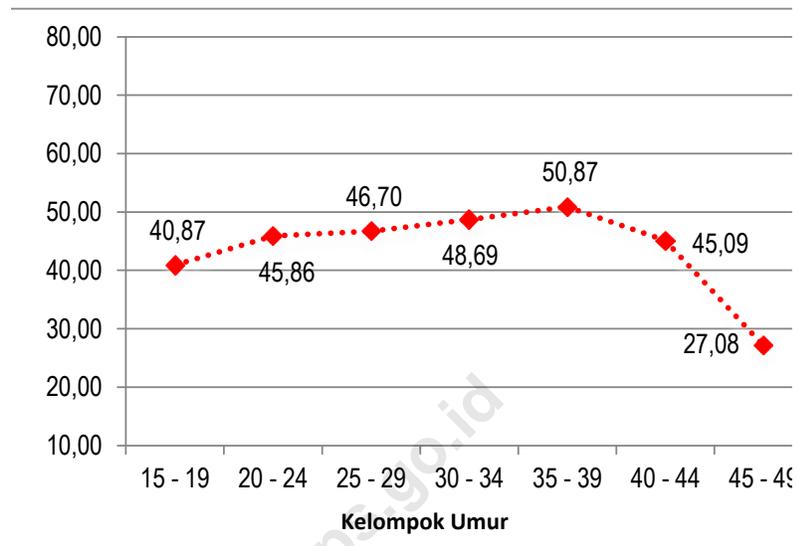


Sumber: Susenas Maret 2017

Gambar 3.2.1. Persentase Perempuan Kawin yang Pernah/Tidak Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2017

Dari Gambar 3.2.1 terlihat bahwa pola yang disajikan menurut kelompok umur cenderung membentuk huruf U. Pada kelompok usia muda persentase perempuan yang pernah/tidak ber-KB relatif besar dan semakin turun pada kelompok umur puncak masa reproduksi perempuan (kelompok umur 30-34 tahun). Ini dapat mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya usia masa reproduksi, pasangan usia subur ini merasakan keharusan untuk menggunakan alat/cara KB. Namun karena alasan lainnya membuat pasangan usia subur memutuskan tidak menggunakan atau memilih untuk tidak menggunakan alat/cara KB tertentu. Puncaknya berada pada perempuan kelompok umur 45-49 tahun, kelompok umur di ujung masa reproduksi, yaitu sekitar 72,92 persen. Untuk alasan tidak ber-KB dapat dilihat

pada bab selanjutnya dalam publikasi ini.

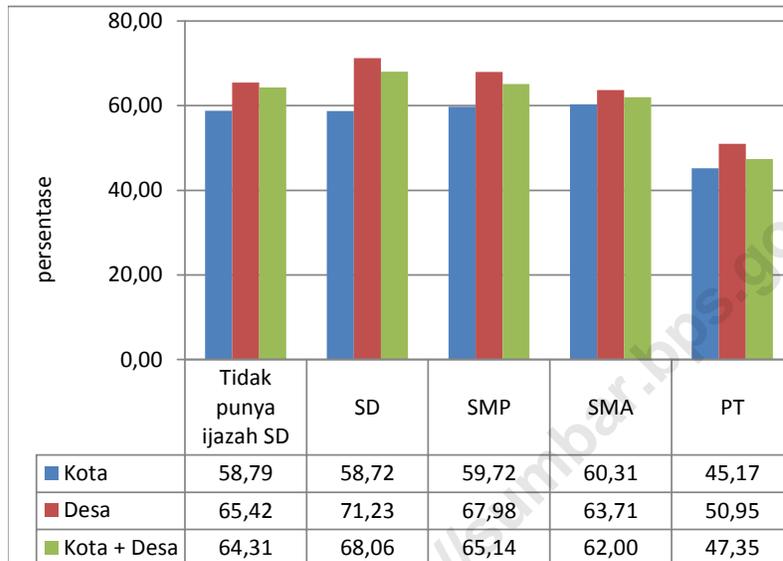


Sumber: Susenas Maret 2017

Gambar 3.2.2. Persentase Perempuan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2017

Gambar 3.2.2 menunjukkan kebalikan dari perilaku pemakaian alat/cara KB diantara perempuan yang berstatus kawin menurut kelompok umur. Sesuai dengan teori pemakaian KB, gambar yang terbentuk adalah huruf U terbalik (K. Widyanti, 2011). Di kelompok umur muda pemakaian alat/cara KB relatif rendah karena di masa-masa awal reproduksi perempuan dan pasangannya berkeinginan untuk punya anak. Kemudian kebutuhan ber-KB akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya usia perempuan. Dapat dilihat dari gambar 3.2.3, puncak masa reproduksi perempuan berada di kelompok umur 35-39 tahun yaitu 50,87 persen.

Menurut pendidikan yang ditamatkan juga terlihat perbedaan perilaku pemakaian KB. Perempuan yang berpendidikan tinggi (tamatan SMA ke atas) cenderung lebih rendah dalam penggunaan KB dibandingkan perempuan yang tamatan SMP ke bawah.



Sumber: Susenas Maret 2017

Gambar 3.2.3. Persentase Perempuan Kawin yang Pernah/Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Pendidikan yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2017

Dari Gambar 3.2.3 terlihat persentase tertinggi dari perempuan kawin yang sedang menggunakan KB adalah yang tamatan SD/ sederajat yaitu sebesar 68,06 persen. Persentase terendah yang sedang/pernah menggunakan KB adalah perempuan yang tamatan perguruan tinggi yaitu 47,35 persen. Pola perilaku ber-KB ini juga terlihat menurut tempat tinggal. Baik daerah perkotaan dan perdesaan persentase perempuan yang

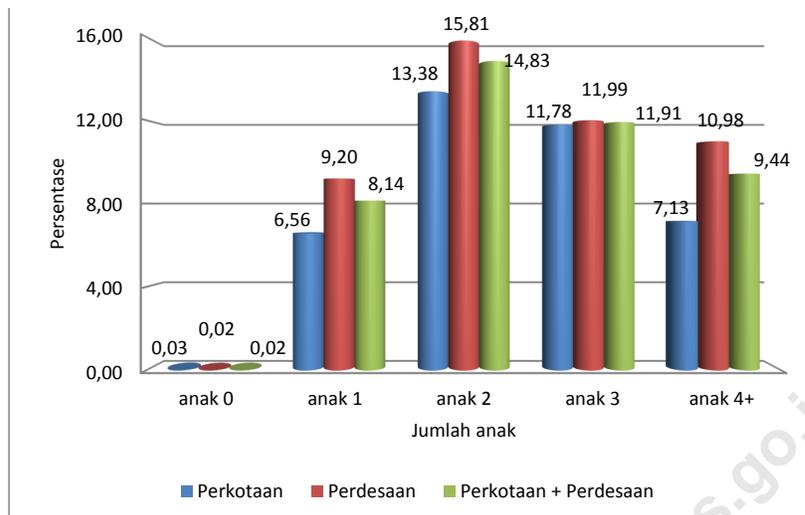
sedang ber-KB terendah adalah perempuan dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, yaitu masing-masing 45,17 persen dan 50,95 persen.

Sementara persentase tertinggi penggunaan alat/cara KB untuk daerah perkotaan adalah perempuan dengan pendidikan tamatan SMA/ sederajat yaitu sebesar 60,31 persen sedangkan di daerah perdesaan adalah perempuan yang tamatan SD/ sederajat, yaitu sebesar 71,23 persen. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan berarti perilaku pengguna KB menurut pendidikan perempuan untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Perilaku ber-KB antara pasangan usia subur yang belum memiliki anak dengan yang sudah memiliki anak menunjukkan pola yang berbeda. Kelompok pasangan yang tidak memiliki anak lahir hidup (ALH) relatif kecil karena adanya keinginan untuk segera memiliki anak. Ketika sudah memiliki anak 1, persentase pemakaian alat KB meningkat. Hal ini kemungkinan setelah memiliki anak 1, pasangan usia subur ingin mengatur jarak kelahiran anak. Pemakaian alat KB semakin meningkat ketika telah memiliki anak 2 atau 3, di mana setelah memiliki anak lebih dari 3, pasangan usia subur menggunakan KB dengan tujuan pembatasan jumlah anak. Pola ini terjadi baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan.

Dari gambar 3.2.4, terlihat kebutuhan untuk ber-KB bagi pasangan usia subur ketika telah memiliki anak dua orang. Bila dilihat menurut tempat tinggal, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan, pasangan yang memiliki kebutuhan ber-KB paling tinggi adalah pasangan dengan jumlah

anak dua, yaitu masing-masing sebesar 13,38 dan 15,81 persen.



Sumber: Susenas Maret 2017

Gambar 3.2.4. Persentase Perempuan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Kelompok Anak Lahir Hidup di Sumatera Barat Tahun 2017

Tabel 3.2.1 menyajikan status penggunaan KB menurut wilayah tempat tinggal dan status ekonomi rumah tangga. Pada tabel tersebut terlihat bahwa prevalensi pemakaian KB (CPR) berbanding terbalik dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Sejalan dengan itu semakin tinggi status ekonomi rumah tangga tersebut kecenderungan untuk tidak menggunakan alat/cara KB juga semakin meningkat.

CPR dari rumah tangga dengan golongan pengeluaran tinggi sebesar 33,79 persen, sementara yang berasal dari rumah tangga dengan golongan pengeluaran menengah dan rendah masing-masing sebesar 41,63 persen dan 49,78 persen. Terlihat juga bahwa pada golongan pengeluaran tinggi lebih separuhnya

tidak menggunakan KB (66,21 %).

Dilihat menurut tipe daerah, terdapat pola yang sama. Baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, semakin tinggi golongan pengeluaran, semakin rendah angka CPR dan semakin tinggi angka tidak menggunakan KB. Ini menarik, untuk ditelusuri apakah pasangan yang berasal dari golongan pengeluaran tinggi tidak ingin ber-KB. Sehingga konsekuensinya angka kelahiran tinggi berasal dari rumah tangga berpengeluaran tinggi. Jika hal ini memang terbukti maka program KB lebih tepat difokuskan kepada kelompok ini.

Tabel 3.2.1. Persentase Perempuan Berstatus Kawin Usia 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, Wilayah Tempat Tinggal dan Golongan Pengeluaran di Sumatera Barat Tahun 2017

Tipe daerah / Status ekonomi rumah tangga	Status Penggunaan Alat/Cara KB	
	Prevalensi Pemakaian KB (CPR)	Tidak
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	38,88	61,12
40 % terendah	45,40	54,60
40 % sedang	37,18	62,82
20 % tinggi	31,21	68,79
Perdesaan	48,01	51,99
40 % terendah	51,88	48,12
40 % sedang	44,59	55,41
20 % tinggi	38,81	61,19
Perkotaan dan perdesaan	44,34	55,66
40 % terendah	49,78	50,22
40 % sedang	41,63	58,37
20 % tinggi	33,79	66,21

Sumber: Susenas Maret 2017

Indikator KB lainnya yang menjadi target dalam tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah informasi mengenai *unmet need* KB. *Unmet need* adalah proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat/cara KB meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.

Tabel 3.2.2. Angka *Unmet Need* di Sumatera Barat Tahun 2017

<i>Unmet Need</i>	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Unmet Need</i> Penjarangan	8,54	7,83	8,11
<i>Unmet Need</i> Penghentian	19,34	15,47	17,02
<i>Unmet Need</i> KB (total)	27,87	23,30	25,13

Sumber: Susenas Maret 2017

Hasil dari Susenas Maret 2017 menunjukkan bahwa *unmet need* total di Provinsi Sumatera Barat adalah 25,13 persen, dengan rincian bahwa *unmet need* penjarangan sebesar 8,11 persen dan *unmet need* penghentian sebesar 17,02 persen. Informasi mengenai *unmet need* digabungkan dengan angka pernah menggunakan KB menunjukkan bahwa adanya kebutuhan untuk ber-KB yang tidak terpenuhi. Dilihat dari wilayah tempat tinggal *unmet need* KB tertinggi berada di daerah perkotaan. Ini mengindikasikan masyarakat perkotaan merasa kebutuhan KB yang mereka inginkan/harapan tidak tersedia. *Unmet need* KB bila tidak ditangani secara serius berkemungkinan untuk ber-

tambah setiap tahun. Ini memungkinkan untuk menjadi bahaya laten terhadap pertumbuhan penduduk menjadi tidak terkendali.

Menurut Donald J Bogue (K. Widyanti, 2011), terdapat rintangan berkomunikasi dalam KB, diantaranya:

- a. Perasaan takut bahwa kesehatan akan terganggu karena terlalu lama pakai pil, IUD atau alat kontrasepsi
- b. Perasaan takut akan akibat sampingan sementara karena pakai pil, IUD
- c. Perasaan takut tanpa alasan terhadap metode vasektomi
- d. Kurangnya komunikasi suami-istri tentang ukuran besar keluarga ideal, jarak antar anak, metode kontrasepsi yang sebaiknya digunakan apabila mereka menjalankan KB
- e. Kurangnya perhatian tentang perencanaan jarak anak di kalangan generasi muda
- f. Pengaruh negatif dari *peer group* dan orang-orang lebih tua
- g. Dan sebagainya

Dari yang disampaikan oleh Bogue sepintas dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan kunci keberhasilan pasangan untuk ber-KB. Upaya menjalin komunikasi memang tidak mudah, namun akan lebih sulit bila tidak dikomunikasikan.

Dari hasil Susenas Maret 2017 beberapa alasan pasangan tidak ber-KB dapat dilihat pada Tabel 3.2.3. Ada sekitar 39,99 persen menyatakan tidak ber-KB karena alasan lainnya, diantaranya jarak ke tempat layanan KB jauh, dan tidak punya biaya untuk ber-KB.

Alasan kedua tidak menggunakan KB yaitu sekitar 28,35

persen, perempuan pernah kawin menjawab takut efek samping ketika menggunakan alat KB. Urutan ketiga yaitu sebesar 26,93 persen adalah alasan fertilitas diantara karena menopause, jarang berhubungan dan sejenisnya. Pola urutan tiga tertinggi ini relatif sama baik untuk perempuan pernah kawin yang tinggal di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan.

Tabel 3.2.3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Menurut Alasan Utama Tidak Ber-KB dan Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2017

Alasan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Alasan fertilitas	25,51	28,05	26,93
Tidak setuju KB	3,70	5,35	4,62
Tidak tahu alat/cara KB	0,00	0,18	0,10
Takut efek samping	28,92	27,91	28,35
Lainnya	41,87	38,51	39,99

Sumber: Susenas Maret 2017

Penyebab lainnya untuk ber-KB juga dimungkinkan adanya hubungan antara karakteristik pasangan usia subur dengan tempat fasilitas KB. Faktor jenis alat KB yang digunakan, usia, tempat tinggal dan pendidikan dapat menyebabkan terjadi perbedaan pemilihan fasilitas layanan KB. Namun apapun yang menjadi alasan perbedaan pilihan tersebut selama dilayani oleh tenaga kesehatan terlatih hal tersebut tidak menjadi masalah. Permasalahan timbul apabila tempat memperoleh KB didapat dari

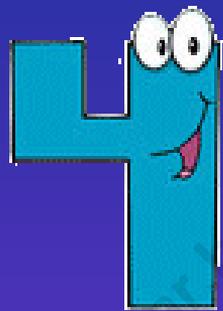
orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang KB. Tabel 3.2.4 berikut menyajikan fasilitas layanan/tempat di mana pasangan usia subur memperoleh alat KB modern.

Tabel 3.2.4 menunjukkan bahwa praktek bidan/bidan di desa/perawat merupakan tempat terpopuler untuk memperoleh alat KB modern, yaitu sekitar 41,77 persen. Posisi kedua tempat fasilitas layanan KB adalah Puskesmas/Pustu/Klinik yang digunakan oleh 25,15 persen perempuan pernah kawin. Ada sedikit perbedaan pola untuk urutan ketiga. Daerah perdesaan urutan ketiga terbanyak tempat memperoleh alat KB modern adalah Polindes/Poskesdes yaitu 11,28 persen sementara untuk daerah perkotaan adalah rumah sakit/bersalin sebesar 16,86 persen.

Tabel 3.2.4. Persentase Perempuan Pernah Kawin Menurut Tempat Memperoleh KB Terakhir dan Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2017

Fasilitas Layanan KB	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah sakit/ bersalin	16,86	6,92	10,40
Puskesmas/Pustu/Klinik	20,89	27,44	25,15
Polindes/Poskesdes	3,98	11,28	8,72
Posyandu/Pos KB/PPKBD	1,57	1,79	1,71
Praktek dokter umum/ kandungan	6,47	4,97	5,50
Praktek bidan/bidan di desa/ perawat	39,24	43,13	41,77
Apotek/toko obat/lainnya	10,99	4,47	6,75

Sumber: Susenas Maret 2017



PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN



BAB 4

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

4.1. Pembangunan Kependudukan

Seperti telah dibahas pada bab-bab sebelumnya bahwa paradigma pembangunan kependudukan tidak hanya upaya untuk pengendalian penduduk namun juga fokus pada kualitas penduduk. Pengendalian penduduk yang dipahami sekarang ini diwujudkan ke dalam perwujudan Keluarga Kecil Berkualitas. Hal ini membuat banyak pasangan melakukan perencanaan ekonomis mengenai mempunyai dan membesarkan anak. Jika jumlah anak terlalu banyak, anak akan menjadi beban dan tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain itu keinginan mewujudkan keluarga kecil berkualitas juga berdampak kepada perubahan sikap terhadap median usia perkawinan pertama. Maksudnya jika di awal pembangunan rata-rata usia perkawinan pertama perempuan berkisar 15-16 tahun sekarang sudah mulai bergeser ke umur yang lebih tinggi (BKKBN Riau, 2016).

Dua hal di atas, jumlah anak dan pergeseran usia perkawinan pertama perempuan dapat dipandang sebagai keberhasilan pembangunan dalam bidang kependudukan. Dengan kata lain keberhasilan program Keluarga Berencana ikut menentukan pencapaian pembangunan kependudukan. Di sisi lain, kegagalan program Keluarga Berencana dapat pula mengindikasikan kegagalan pembangunan kependudukan.

4.2. Umur Perkawinan/Hamil Pertama

Hasil dari Susenas Maret 2017 dapat memberikan potret keberhasilan dan hal yang masih menjadi pekerjaan untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Rata-rata usia perkawinan pertama baik perempuan dan laki-laki di Sumatera Barat sudah jauh melewati usia yang disyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, di mana menurut undang-undang tersebut usia laki-laki untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun.

Tabel 4.2.1. Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2017 (Tahun)

Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	26,48	24,85	25,51
Perempuan	22,40	20,35	21,17
Laki-Laki dan Perempuan	24,26	22,39	23,14

Sumber: Susenas Maret 2017

Dari Tabel 4.2.1 terlihat bahwa rata-rata usia perkawinan pertama di Sumatera Barat secara keseluruhan adalah antara 23 dan 24 tahun. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, rata-rata usia perkawinan pertama laki-laki di Sumatera Barat adalah 25,51 tahun lebih tinggi dibanding usia perkawinan pertama perempuan yaitu 21,17 tahun. Ini berarti bahwa rata-rata umur perkawinan pertama penduduk Sumatera Barat sudah ideal menurut BKKBN

karena secara biologis dan psikologis adalah umur 20-25 tahun bagi perempuan dan umur 25-30 tahun bagi laki-laki sudah cukup matang dalam aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, social ekonomi dan reproduksi. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Hal ini didukung juga oleh hasil penelitian Brian Christian dan Tom Griffiths (2018) bahwa usia ideal menikah adalah 26 tahun.

Sementara bila dilihat menurut wilayah tempat tinggal, pola yang tampak relatif sama untuk daerah perkotaan dan perdesaan yaitu usia perkawinan pertama laki-laki lebih tinggi dibanding usia perempuan. Ini mengindikasikan hal yang baik terutama untuk perempuan karena usia perkawinan pertama di atas 20 tahun perempuan dianggap telah siap untuk bereproduksi karena apabila hamil di usia muda rahim belum siap dan membuatkan saluran kelahiran mudah pecah akibatnya dapat menyebabkan kematian saat melahirkan (BKKBN, 2013).

Tabel 4.2.2. Rata-Rata Umur Hamil Pertama Perempuan Pernah Kawin Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2017

Jenis Kelamin	Umur
(1)	(2)
Perkotaan	23,68
Perdesaan	21,77
Perkotaan dan Perdesaan	22,53

Sumber: Susenas Maret 2017

Dari Tabel 4.2.2 terlihat rata-rata umur perempuan ketika hamil pertama baik di daerah perkotaan maupun perdesaan di atas 20 tahun yaitu berturut-turut 23,68 tahun dan 21,77 tahun. Hal ini mengindikasikan baik perempuan di daerah perkotaan dan perdesaan telah tereduksi bahwa hamil di bawah umur 20 tahun dapat membahayakan ibu dan bayi. Namun perlu jadi perhatian bahwa masih ada usia perkawinan pertama dan usia hamil pertama di bawah usia 16 tahun.

Tabel 4.2.3. Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Usia Perkawinan Pertama dan Hamil Pertama di Bawah 16 Tahun di Sumatera Barat Tahun 2017

Uraian	Persentase
(1)	(2)
Kawin ≤ 16 Tahun	6,01
Hamil ≤ 16 Tahun	3,65

Sumber: Susenas Maret 2017

Tabel 4.2.3 menunjukkan bahwa masih ada 6,01 persen perempuan yang usia perkawinan pertama di bawah 16 tahun. Dari yang kawin tersebut 3,65 persen perempuan hamil usia di bawah 16 tahun. Tampak bahwa hampir separuh dari perempuan yang kawin usia di bawah 16 tahun cenderung untuk hamil. Ini cukup memprihatinkan seperti yang telah dibahas sebelumnya perempuan usia di bawah 20 tahun tidak direkomendasikan untuk bereproduksi.

4.3. Rata-Rata Jumlah Anak Lahir Hidup

Seperti disebut sebelumnya, perubahan jumlah anak lahir hidup juga mengindikasikan keberhasilan perwujudan keluarga kecil berkualitas. Hasil Susenas Maret 2017 rata-rata anak yang dilahirkan hidup oleh perempuan di Sumatera Barat sudah menggambarkan keberhasilan tersebut (Tabel 4.3.1).

Rata-rata jumlah anak lahir hidup menunjukkan kemampuan reproduksi perempuan selama masa reproduksinya (yaitu umur 15-49 tahun). Dengan kata lain angka ini dapat menunjukkan tingkat fertilitas dari sekelompok perempuan di wilayah tersebut. Semakin banyak anak yang dilahirkan hidup, semakin tinggi tingkat fertilitas di daerah tersebut (BPS,2015).

Tabel 4.3.1. Rata-Rata Jumlah Anak Yang Dilahirkan Hidup Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Sumatera Barat Tahun 2017 (Orang)

Jenis Kelamin	Jumlah Anak
(1)	(2)
Perkotaan	2,51
Perdesaan	2,68
Perkotaan dan Perdesaan	2,61

Sumber: Susenas Maret 2017

Tabel 4.3.1 menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup di Sumatera Barat antara 2 dan 3 anak per perempuan usia subur. Bila dilihat menurut wilayah tempat tinggal perempuan yang tinggal di daerah perdesaan memiliki fertilitas

lebih tinggi dibandingkan dengan yang tinggal di daerah perkotaan. Rata-rata jumlah anak lahir hidup di daerah perkotaan adalah 2,51 orang dan di daerah perdesaan adalah 2,68 orang.

<https://sumbar.bps.go.id>

5

PENUTUP



BAB 5

PENUTUP

Beberapa catatan penting yang dapat digunakan sebagai bahan/referensi bagi penentu kebijakan di Provinsi Sumatera Barat guna penyusunan rencana pembangunan bidang kependudukan dan KB kedepan, yaitu:

1. Penduduk di Sumatera Barat digolongkan sebagai penduduk yang cenderung sudah meninggalkan struktur umur muda. Hal ini mengisyaratkan pemerintah untuk memberikan atau membuat program yang sesuai dengan kelompok umur penduduk. Misalkan lebih banyak membuat program berkaitan dengan pendidikan dan keterampilan (vokasi) bagi penduduk usia produktif yang akan masuk dalam angkatan kerja.
2. Keluarga Berencana menjadi cara untuk meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga. Namun perilaku pengguna KB beragam menurut karakteristik tempat tinggal, kelompok pengeluaran, kelompok umur, dan jumlah anak lahir hidup yang dimiliki. Perbedaan perilaku ber-KB merupakan gambaran atau panduan bagi pembuat program agar dapat menyesuaikan antara kebutuhan dan layanan yang tersedia.
3. Beberapa indikator ber-KB yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah *ever-used Contraceptives* (pernah ber-KB). Adanya kecenderungan ketidakcocokan dengan

alat/cara KB yang pernah digunakan dan angka *unmet need* KB mengindikasikan kebutuhan untuk ber-KB yang tidak tersedia. Bila hal ini diabaikan, akan berdampak pada pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.

4. Masih adanya perempuan yang usia perkawinan pertama dan hamil pertamanya di bawah 16 tahun. Ini juga merupakan catatan dalam pembangunan kependudukan yang butuh perhatian serius dari pemangku kebijakan.

<https://sumbar.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Bappeda Sumatera Barat. 2016. *Musrembang RJMD 2016*

Bappenas. 2016. *Kependudukan dan Keluarga Berencana*.
Online [accessed on 27 September 2016]
www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9745/1795

BKKBN. 2013. '4 Terlalu 3 Terlambat' Penyebab Naiknya Angka Kematian Ibu. Online [accessed on 7 Desember 2016]
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/17/mxxxxn-4-terlalu-3-terlambat-penyebab-naiknya-angka-kematian-ibu>

BKKBN Riau. 2016. *Kependudukan Dalam Presfektif Pembangunan Ekonomi Guna Pembangunan Nasional*.
Online [accessed on 7 Desember 2016]
<http://riau.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=1082&ContentTypeId=0x01003DCABABC04B7084595DA364423DE7897>

BKKBN. 2017. Usia Pernikahan Ideal 21-25 tahun. Online [accessed on 2 November 2018] <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

BPS. 2010. *Profil Indikator Pendidikan Indonesia 2009 (Kajian Indikator)*. Jakarta: CV. Nario Sari

BPS. 2010. *Modul I Struktur Umur Penduduk (Workshop Hasil Olah Cepat SP2010)*. Jakarta

BPS. 2015. *Pedoman Analisis Data Kependudukan dan KB hasil Susenas 2015*. Jakarta: BPS

BPS Sumatera Barat. 2016. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 2015*. Padang: CV Sarana Multi Abadi

BPS Sumatera Barat. 2016. *Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat 2015. Hasil Susenas Maret 2015* Padang: CV Sarana Multi Abadi

BPS. 2016. *Sirusa (Sistem Rujukan Statistik)*

Christian, B. dan Griffiths, T. 2016. *Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions*. The New York Times Book Review, Picador.

Columbia University. 2016. *Demography Learning Module*. Online [accessed on 31 October 2016] <http://www.columbia.edu/itc/hs/pubhealth/modules/demography/populationRatio.html>

Ekarini, S,M,B. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Partisipasi Pria Dalam Keluarga Berencana di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali*. (thesis S2, unpublished)

K, Widyanti, M, S. 2011. *Keluarga Berencana*. (bahan ajar Pasca Sarjana), Lembaga Demografi FEUI.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No.48 Padang, 25135
Telp (0751) 442160 Email : sumbar@bps.go.id
Homepage: <https://sumbar.bps.go.id>

ISBN 978-602-6544-39-1

